



Pengaruh Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Pemerintah Desa Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen)

Destian Eka Kumalasari, Djoko Kristianto

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Slamet Riyadi

destianeka03@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada desa di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi dalam penelitian ini terdiri atas perangkat desa yang berasal dari 16 desa di Kecamatan Tanon. Sampel penelitian sebanyak 150 responden yang ditentukan menggunakan teknik sensus. Data penelitian dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden dan kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program IBM SPSS Statistics 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, yang ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,158 dengan tingkat signifikansi 0,046. Akuntabilitas juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan koefisien regresi sebesar 0,266 dan tingkat signifikansi 0,003. Sementara itu, Transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan koefisien regresi sebesar 0,527 dan tingkat signifikansi 0,000. Di antara ketiga variabel tersebut, Transparansi menjadi variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara efektif, akuntabel, dan transparan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui optimalisasi Alokasi Dana Desa, penguatan Akuntabilitas, serta penerapan Transparansi dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Kesejahteraan Masyarakat.

Abstract

This study aims to analyze the influence of Village Fund Allocation, accountability, and transparency on community welfare in the villages of Tanon District, Sragen Regency. The study employs a quantitative method with a survey approach. The population consists of village officials from 16 villages in Tanon District. A sample of 150 respondents was selected using the census technique. Data were collected via questionnaires and analyzed using multiple linear regression with IBM SPSS Statistics 25 software. The results indicate that Village Fund Allocation has a positive and significant effect on community welfare, evidenced by a regression coefficient of 0.158 and a significance level of 0.046. Accountability also has a positive and significant effect on community welfare, with a regression coefficient of 0.266 and a significance level of 0.003. Meanwhile, transparency has a positive and significant effect on community welfare, with a regression coefficient of 0.527 and a significance level of 0.000. Among the three variables, transparency exerts the most dominant influence on community welfare. The findings demonstrate that effective, accountable, and transparent village financial management can support improvements in community welfare. Therefore, the quality of village financial governance must be continuously enhanced by optimizing Village Fund Allocation, strengthening accountability, and implementing transparency throughout every stage of village financial management.

Keywords: Village Fund Allocation, Accountability, Transparency, Community Welfare

1. Pendahuluan

Dana desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan instrumen fiskal yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik di tingkat desa. Besarnya sumber daya yang dikelola pemerintah desa menuntut tata kelola yang tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks Kabupaten Sragen, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa kepada 196 desa dengan total sekitar Rp210,9 miliar pada tahun anggaran 2025. Besarnya dana tersebut menunjukkan

Pengaruh Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Pemerintah Desa Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen)

bahwa kualitas pengelolaan keuangan desa menjadi faktor penting dalam memastikan manfaat pembangunan benar-benar diterima masyarakat.

Urgensi tata kelola tersebut juga terlihat dari adanya kasus penyimpangan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sragen. Kasus dugaan penyalahgunaan hasil sewa tanah kas desa di Desa Purworejo, Kecamatan Gemolong, menunjukkan bahwa sumber daya desa dapat berisiko disalahgunakan ketika mekanisme pertanggungjawaban dan keterbukaan tidak berjalan memadai. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada besarnya dana yang diterima desa, tetapi juga pada bagaimana dana tersebut dialokasikan, dipertanggungjawabkan, dan diinformasikan kepada masyarakat.

Secara teoritis, hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui Agency Theory Jensen dan Meckling (1976). Masyarakat sebagai principal memberikan kewenangan kepada pemerintah desa sebagai agent untuk mengelola sumber daya publik. Perbedaan kepentingan dan asimetri informasi dapat menimbulkan agency conflict. Akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan transparansi menyediakan informasi yang memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan. Dengan demikian, pengelolaan ADD yang tepat, akuntabel, dan transparan secara teoritis dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi Dana Desa memiliki posisi penting karena dana yang dikelola pemerintah desa pada akhirnya diarahkan pada kebutuhan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan. Ketepatan penggunaan dana menjadi penting agar sumber daya publik tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat. Dalam penelitian ini, ADD dipahami melalui ketepatan penggunaan dana desa, pemanfaatan dana untuk pembangunan, pemanfaatan untuk pemberdayaan masyarakat, dan efektivitas penggunaan dana desa. Keempat indikator tersebut menggambarkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana tidak hanya dilihat dari jumlah dana, tetapi juga dari kesesuaian penggunaannya dengan kebutuhan desa.

Akuntabilitas menjadi mekanisme yang memungkinkan masyarakat dan pihak terkait menilai apakah kewenangan pengelolaan sumber daya telah dijalankan sesuai amanah. Dalam pengelolaan desa, akuntabilitas tercermin dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta keterbukaan dalam pelaporan. Akuntabilitas yang baik dapat memperjelas siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan dan penggunaan anggaran, sehingga memperkuat kepercayaan serta mengurangi ruang terjadinya penyimpangan.

Transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Informasi yang tersedia dan mudah diakses memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui penggunaan sumber daya publik, memahami keputusan yang dibuat pemerintah desa, serta melakukan pengawasan. Dalam penelitian ini, transparansi diukur melalui ketersediaan informasi keuangan, kemudahan akses informasi, keterbukaan dalam pengambilan keputusan, dan publikasi laporan keuangan. Posisi transparansi menjadi semakin penting karena informasi merupakan salah satu alat utama untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara pengelolaan dana desa dan kesejahteraan belum sepenuhnya konsisten. Khasanah dan Marisan (2022) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif, sedangkan penggunaan ADD dan transparansi tidak berpengaruh secara parsial. Rukmana et al. (2023) menemukan bahwa penggunaan dana desa, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan. Widowati et al. (2023) juga menunjukkan pengaruh positif akuntabilitas. Polii et al. (2024) menemukan bahwa pengelolaan ADD dan transparansi berpengaruh signifikan. Sebaliknya, Damayanti dan Handayani (2025) menemukan bahwa ADD dan transparansi tidak berpengaruh signifikan, sedangkan akuntabilitas berpengaruh positif.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tata kelola keuangan desa terhadap kesejahteraan dapat dipengaruhi oleh konteks wilayah, mekanisme pengelolaan, serta kondisi masyarakat. Inkonsistensi paling terlihat pada variabel transparansi. Selain research gap berupa ketidakkonsistenan hasil, terdapat contextual gap karena bukti empiris yang secara khusus menguji ADD, akuntabilitas, dan transparansi pada desa-desa di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen masih terbatas.

Penelitian ini mengisi contextual gap tersebut dengan menguji tiga variabel utama pada 16 desa di Kecamatan Tanon. Novelty penelitian terletak pada pengujian kembali hubungan ADD, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kesejahteraan masyarakat dalam konteks tata kelola desa di Tanon dengan landasan Agency Theory.

Penggunaan konteks lokal penting karena kualitas tata kelola tidak selalu seragam antarwilayah. Hasil penelitian diharapkan memperkaya bukti empiris mengenai faktor tata kelola yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat desa.

Kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini tidak dibatasi hanya pada aspek pendapatan. Kesejahteraan dipahami sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar material dan nonmaterial sehingga masyarakat dapat hidup layak. Pengukurannya mencakup tingkat pendapatan masyarakat, akses pendidikan, akses kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pendekatan tersebut sesuai dengan tujuan pengelolaan sumber daya desa yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Alokasi Dana Desa, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan penelitian diarahkan pada apakah masing-masing variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.

1.1. Landasan Teoretis dan Pengembangan Hipotesis

Agency Theory Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan antara principal dan agent dalam suatu organisasi. Dalam pengelolaan ADD, masyarakat bertindak sebagai principal yang memberikan amanah kepada pemerintah desa sebagai agent untuk mengelola sumber daya publik. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab menggunakan dana sesuai kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku. Perbedaan kepentingan dan asimetri informasi dapat menimbulkan *agency conflict* sehingga diperlukan pengawasan dan pengendalian.

Akuntabilitas dan transparansi menjadi mekanisme penting dalam hubungan tersebut. Akuntabilitas menunjukkan kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat, sedangkan transparansi mencerminkan keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi pengelolaan dana. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan membantu mengurangi ketidakseimbangan informasi antara principal dan agent.

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan ADD yang tepat sasaran diharapkan meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Atas dasar hubungan tersebut, penelitian menguji tiga hipotesis, yaitu ADD berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dan transparansi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian menguji hubungan antarvariabel melalui data numerik yang diperoleh dari jawaban responden. Objek penelitian adalah pemerintah desa di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, yang terdiri atas 16 desa. Data yang digunakan berupa data primer yang dikumpulkan secara langsung melalui kuesioner kepada perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa.

Populasi penelitian mencakup seluruh perangkat desa yang memenuhi kriteria keterlibatan dalam pengelolaan keuangan desa. Teknik sampling yang digunakan adalah sensus atau sampling jenuh, yaitu seluruh anggota populasi yang memenuhi kriteria dijadikan sasaran responden. Penelitian menetapkan target 150 responden. Pengumpulan data dilaksanakan selama tujuh hari dan sebanyak 132 kuesioner berhasil diperoleh serta digunakan dalam pengolahan data.

Instrumen penelitian menggunakan pernyataan tertutup dengan skala Likert lima tingkat, yaitu 1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju. Variabel ADD dioperasionalkan melalui ketepatan penggunaan dana, pemanfaatan untuk pembangunan, pemanfaatan untuk pemberdayaan masyarakat, dan efektivitas penggunaan dana. Akuntabilitas diukur melalui perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta keterbukaan pelaporan. Transparansi diukur melalui ketersediaan informasi keuangan, kemudahan akses informasi, keterbukaan pengambilan keputusan, dan publikasi laporan keuangan. Kesejahteraan masyarakat diukur melalui tingkat pendapatan, akses pendidikan, akses kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Pengujian kualitas data dilakukan sebelum pengujian hipotesis. Uji validitas digunakan untuk menilai kemampuan setiap item dalam mengukur konstruk yang diteliti, sedangkan reliabilitas digunakan untuk melihat konsistensi internal instrumen. Validitas item ditentukan berdasarkan nilai signifikansi *Pearson correlation* <0,05. Reliabilitas ditentukan menggunakan *Cronbach's Alpha* dengan kriteria >0,70. Tahap berikutnya adalah pengujian asumsi klasik untuk memastikan model regresi memenuhi persyaratan analisis.

Uji normalitas residual dilakukan menggunakan Kolmogorov–Smirnov dan Monte Carlo. Multikolinearitas dinilai melalui *Tolerance* >0,10 dan *VIF* <10. Heteroskedastisitas diuji dengan metode Glejser pada tingkat signifikansi 5%. Setelah model memenuhi asumsi, analisis dilanjutkan dengan regresi linier berganda dan pengujian hipotesis menggunakan uji t.

Model regresi yang digunakan adalah $Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$. Y merupakan kesejahteraan masyarakat, X1 merupakan Alokasi Dana Desa, X2 merupakan akuntabilitas, X3 merupakan transparansi, a merupakan konstanta, β merupakan koefisien regresi, dan e merupakan error. Hipotesis diterima apabila nilai signifikansi uji t <0,05. *Adjusted R Square* digunakan untuk melihat proporsi variasi kesejahteraan masyarakat yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Karakteristik Responden

Dari 132 responden, sebanyak 104 responden (78,8%) berjenis kelamin laki-laki dan 28 responden (21,2%) perempuan. Berdasarkan usia, 81 responden (61,4%) berusia lebih dari 40 tahun, 43 responden (32,6%) berusia 30–39 tahun, dan 8 responden (6,1%) berusia 19–29 tahun. Dari sisi jabatan, terdapat 13 kepala desa, 15 sekretaris desa, 14 kaur keuangan, 10 kaur perencanaan, dan 80 staf lainnya. Sebanyak 54 responden (40,9%) memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa penelitian memperoleh jawaban dari perangkat desa dengan pengalaman kerja yang beragam.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	n	%
Jenis kelamin	Laki-laki	104	78,8
	Perempuan	28	21,2
Usia	>40 tahun	81	61,4
	30–39 tahun	43	32,6
	19–29 tahun	8	6,1
Jabatan	Kepala desa	13	9,8
	Sekretaris desa	15	11,4
	Kaur keuangan	14	10,6
	Kaur perencanaan	10	7,6
	Staf lainnya	80	60,6
Masa kerja	>10 tahun	54	40,9

3.2. Kualitas Instrumen

Seluruh item kuesioner pada variabel ADD, akuntabilitas, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat memiliki nilai signifikansi *Pearson* sebesar 0,000 sehingga memenuhi kriteria validitas. Nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel adalah 0,839 untuk ADD, 0,884 untuk akuntabilitas, 0,865 untuk transparansi, dan 0,880 untuk kesejahteraan masyarakat. Seluruh nilai berada di atas 0,70 sehingga instrumen dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam analisis.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Alokasi Dana Desa	0,839	Reliabel
Akuntabilitas	0,884	Reliabel
Transparansi	0,865	Reliabel
Kesejahteraan masyarakat	0,880	Reliabel

3.3. Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menghasilkan Monte Carlo *significance* sebesar 0,271 ($>0,05$), sehingga residual dinyatakan berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan *Tolerance* untuk ADD, akuntabilitas, dan transparansi masing-masing sebesar 0,362; 0,248; dan 0,388, sedangkan VIF masing-masing 2,766; 4,029; dan 2,577. Seluruh nilai memenuhi kriteria sehingga tidak terdapat multikolinearitas. Uji Glejser menghasilkan signifikansi 0,280 untuk ADD, 0,285 untuk akuntabilitas, dan 0,092 untuk transparansi. Seluruh nilai lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian	Indikator	Hasil	Kesimpulan
Normalitas	Monte Carlo Sig.	0,271	Normal
Multikolinearitas	Tolerance	0,362 / 0,248 / 0,388	Tidak ada
Multikolinearitas	VIF	2,766 / 4,029 / 2,577	Tidak ada
Heteroskedastisitas	Glejser Sig.	0,280 / 0,285 / 0,092	Tidak ada

3.4. Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis

Hasil regresi menghasilkan persamaan $Y = 0,766 + 0,158X_1 + 0,266X_2 + 0,527X_3 + e$. Seluruh koefisien variabel independen bernilai positif. ADD memiliki koefisien 0,158 dengan nilai t 2,017 dan signifikansi 0,046. Akuntabilitas memiliki koefisien 0,266, nilai t 3,034, dan signifikansi 0,003. Transparansi memiliki koefisien 0,527, nilai t 7,597, dan signifikansi 0,000. Karena seluruh signifikansi berada di bawah 0,05, ketiga hipotesis diterima. Transparansi memiliki koefisien terbesar dan menjadi variabel paling dominan.

Tabel 4. Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	B	t	Sig.	Keputusan
Konstanta	0,766	-	-	-
ADD (X1)	0,158	2,017	0,046	Diterima
Akuntabilitas (X2)	0,266	3,034	0,003	Diterima
Transparansi (X3)	0,527	7,597	0,000	Diterima

$R = 0,870$; $R^2 = 0,757$; Adjusted $R^2 = 0,752$.

3.5. Pembahasan Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tepat penggunaan ADD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan. Koefisien sebesar 0,158 menunjukkan arah hubungan yang positif, sedangkan signifikansi 0,046 menunjukkan bahwa hubungan tersebut memenuhi batas pengujian 5%.

Secara substantif, hasil tersebut dapat dipahami dari fungsi dana yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan desa. Ketika ADD digunakan sesuai sasaran, dana dapat mendukung kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang memberi manfaat kepada masyarakat. Indikator penelitian menempatkan ketepatan penggunaan, pembangunan, pemberdayaan, dan efektivitas sebagai bagian dari kualitas ADD. Dengan demikian, manfaat ADD terhadap kesejahteraan berkaitan dengan bagaimana pemerintah desa menerjemahkan anggaran menjadi program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan Kurniawan dan Efendi (2019) yang menunjukkan adanya pengaruh positif ADD terhadap kesejahteraan. Namun, hasil penelitian berbeda dengan Khasanah dan Marisan (2022) serta Damayanti dan Handayani (2025) yang melaporkan bahwa ADD tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas ADD dapat dipengaruhi konteks wilayah dan praktik pengelolaan. Dalam konteks Tanon, hasil penelitian memberikan bukti bahwa aspek alokasi dan pemanfaatan dana memiliki hubungan nyata dengan kesejahteraan masyarakat.

3.6. Pembahasan Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan koefisien 0,266 dan

signifikansi 0,003. Hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya desa bukan hanya persoalan administratif, tetapi berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa menghasilkan pengelolaan yang berorientasi pada manfaat masyarakat. Perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta keterbukaan pelaporan menjadi bagian penting dari mekanisme tersebut.

Dalam perspektif *Agency Theory*, akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme pengendalian hubungan antara *principal* dan *agent*. Pemerintah desa sebagai *agent* memiliki kewajiban menjelaskan keputusan dan penggunaan sumber daya kepada masyarakat sebagai *principal*. Semakin baik pertanggungjawaban, semakin kecil ruang bagi penggunaan sumber daya yang tidak sesuai tujuan. Kondisi tersebut mendukung terciptanya pengelolaan program yang lebih terarah sehingga manfaat pembangunan dapat diterima masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Khasanah dan Marisan (2022), Widowati et al. (2023), serta Damayanti dan Handayani (2025) yang menunjukkan pengaruh positif akuntabilitas. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa akuntabilitas merupakan unsur tata kelola yang penting dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa perlu menjaga kualitas perencanaan, dokumentasi, pelaporan, dan pengawasan agar pertanggungjawaban tidak sekadar memenuhi kewajiban formal, tetapi menjadi bagian dari pengendalian pengelolaan dana desa.

3.7. Pembahasan Pengaruh Transparansi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Transparansi merupakan variabel dengan pengaruh paling dominan dalam penelitian. Koefisien regresi sebesar 0,527 dan signifikansi 0,000 menunjukkan hubungan positif dan signifikan. Nilai koefisien yang paling besar

dibandingkan ADD dan akuntabilitas mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi mempunyai kontribusi relatif paling kuat dalam model penelitian ini.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui peran informasi dalam mengurangi asimetri informasi. Masyarakat memerlukan informasi mengenai penggunaan dana, keputusan, dan laporan keuangan agar dapat memahami sekaligus mengawasi pengelolaan sumber daya desa. Ketersediaan informasi, kemudahan akses, keterbukaan dalam pengambilan keputusan, dan publikasi laporan keuangan membuat masyarakat memiliki dasar untuk menilai apakah program desa telah berjalan sesuai tujuan. Dengan demikian, transparansi dapat memperkuat kepercayaan dan mendorong pengelolaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Rukmana et al. (2023) dan Polii et al. (2024) yang menemukan pengaruh positif atau signifikan transparansi. Namun, hasil ini berbeda dengan Khasanah dan Marisan (2022) serta Damayanti dan Handayani (2025) yang menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan hasil tersebut memperkuat research gap penelitian. Pada konteks Tanon, keterbukaan informasi menunjukkan hubungan yang kuat dengan kesejahteraan, sehingga transparansi perlu ditempatkan sebagai prioritas dalam tata kelola desa.

Dominannya transparansi juga memiliki implikasi praktis. Pemerintah desa tidak cukup hanya menyusun laporan, tetapi perlu memastikan informasi dapat dipahami dan diakses oleh masyarakat. Publikasi anggaran dan realisasi, keterbukaan dalam keputusan, serta penggunaan sarana informasi yang tersedia dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi. Dengan informasi yang lebih terbuka, pengawasan masyarakat dapat berjalan lebih baik dan potensi ketidaksesuaian penggunaan dana dapat ditekan.

3.8. Implikasi Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian mendukung *Agency Theory* karena menunjukkan pentingnya mekanisme yang mengurangi asimetri informasi dan memperkuat pertanggungjawaban *agent* kepada *principal*. ADD yang dikelola tepat, akuntabilitas, dan transparansi semuanya menunjukkan hubungan positif dengan kesejahteraan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa tata kelola dan pengelolaan sumber daya publik tidak dapat dipisahkan dari tujuan akhir pembangunan desa, yaitu peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Secara praktis, pemerintah desa di Kecamatan Tanon dapat mempertahankan ketepatan sasaran penggunaan ADD, memperkuat proses pertanggungjawaban, dan terutama meningkatkan keterbukaan informasi. Transparansi yang menjadi variabel paling dominan menunjukkan bahwa penyediaan informasi yang mudah diakses masyarakat merupakan area yang penting untuk terus diperbaiki. Masyarakat juga memiliki posisi penting dalam memanfaatkan informasi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program desa.

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,752 menunjukkan bahwa masih terdapat 24,8% variasi kesejahteraan masyarakat yang berada di luar penjelasan model. Hal tersebut membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk menguji faktor lain dengan tetap mempertimbangkan konteks pengelolaan desa. Pengujian pada wilayah berbeda juga dapat dilakukan untuk melihat konsistensi hasil penelitian.

3.9. Sintesis Temuan Penelitian

Jika ketiga hasil pengujian dipandang secara bersamaan, penelitian memperlihatkan bahwa kesejahteraan masyarakat desa berkaitan dengan kualitas pengelolaan sumber daya sekaligus kualitas tata kelola. ADD memiliki koefisien positif 0,158, akuntabilitas 0,266, dan transparansi 0,527. Ketiga koefisien tersebut menunjukkan arah hubungan yang sama, tetapi besarnya kontribusi relatif berbeda. Transparansi memiliki koefisien terbesar, sedangkan ADD memiliki koefisien paling kecil di antara tiga prediktor. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas keterbukaan informasi mempunyai hubungan relatif kuat dengan kesejahteraan dalam model penelitian.

Hasil tersebut memperlihatkan hubungan yang saling melengkapi antara sumber daya dan tata kelola. Dana yang tersedia merupakan sumber daya untuk menjalankan program desa, sedangkan akuntabilitas dan transparansi merupakan mekanisme untuk memastikan sumber daya tersebut dikelola sesuai tujuan. Ketika dana tersedia tetapi tidak disertai pertanggungjawaban dan keterbukaan, manfaatnya berpotensi tidak optimal. Sebaliknya, tata kelola yang baik membantu memastikan sumber daya diarahkan pada kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,752 memperkuat arti penting ketiga variabel tersebut dalam model. Sebanyak 75,2% variasi kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan oleh ADD, akuntabilitas, dan transparansi. Sebesar 24,8% variasi lainnya berada di luar model penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian memberikan bukti kuat mengenai model yang diuji sekaligus menunjukkan masih adanya ruang untuk menjelaskan faktor lain pada penelitian berikutnya.

3.10. Kesesuaian Temuan dengan *Agency Theory*

Agency Theory menjelaskan bahwa hubungan antara *principal* dan *agent* dapat menimbulkan perbedaan kepentingan serta asimetri informasi. Dalam konteks penelitian, masyarakat berada pada posisi *principal*, sedangkan pemerintah desa bertindak sebagai *agent* yang menerima amanah untuk mengelola sumber daya publik. Pemerintah desa memiliki akses lebih besar terhadap informasi mengenai penganggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan. Karena itu diperlukan mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan menilai tindakan pemerintah desa.

Temuan pengaruh positif akuntabilitas terhadap kesejahteraan mendukung fungsi pertanggungjawaban dalam hubungan keagenan. Ketika pemerintah desa memiliki mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat memperoleh dasar yang lebih baik untuk menilai penggunaan sumber daya. Hal tersebut membantu mengurangi peluang tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Temuan transparansi sebagai variabel paling dominan juga relevan dengan masalah asimetri informasi. Masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan secara efektif apabila informasi mengenai penggunaan dana, keputusan, dan laporan keuangan sulit diperoleh. Keterbukaan informasi dapat memperkecil jarak informasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Hasil penelitian di Tanon menunjukkan bahwa mekanisme tersebut mempunyai hubungan kuat dengan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh positif ADD menunjukkan bahwa mekanisme keagenan tidak hanya berkaitan dengan pengawasan, tetapi juga penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan *principal*. Masyarakat memberikan mandat kepada pemerintah desa agar sumber daya yang dikelola menghasilkan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan. Ketepatan penggunaan ADD menjadi penting karena menunjukkan apakah mandat tersebut diterjemahkan menjadi program yang memberi manfaat.

3.11. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian memperlihatkan persamaan sekaligus perbedaan dengan penelitian terdahulu. Pada variabel akuntabilitas, hasil penelitian konsisten dengan Khasanah dan Marisan (2022), Widowati et al. (2023), serta

Damayanti dan Handayani (2025), yang menunjukkan pengaruh positif akuntabilitas. Konsistensi tersebut memperkuat argumentasi bahwa pertanggungjawaban pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dari tata kelola desa.

Pada variabel ADD, hasil penelitian mendukung temuan yang menunjukkan adanya pengaruh positif, seperti Kurniawan dan Efendi (2019), tetapi berbeda dengan penelitian yang memperoleh hasil tidak signifikan, seperti Khasanah dan Marisan (2022) dan Damayanti dan Handayani (2025). Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas ADD dapat dipengaruhi konteks wilayah dan praktik pengelolaan.

Pada variabel transparansi, penelitian ini menemukan pengaruh positif dan signifikan serta menjadikannya prediktor paling dominan. Hasil tersebut sejalan dengan Rukmana et al. (2023) dan Polii et al. (2024), tetapi berbeda dengan Khasanah dan Marisan (2022) dan Damayanti dan Handayani (2025). Inkonsistensi tersebut merupakan bagian utama research gap penelitian dan menunjukkan pentingnya pengujian pada konteks wilayah yang berbeda.

Perbedaan hasil antarpelelitian dapat menunjukkan bahwa hubungan variabel tata kelola dengan kesejahteraan bersifat kontekstual. Wilayah penelitian, karakteristik responden, mekanisme pengelolaan dana, dan tingkat keterbukaan informasi dapat memengaruhi persepsi serta hasil pengujian. Oleh karena itu, pengujian pada wilayah berbeda tetap relevan untuk memperkaya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan desa.

3.12. Implikasi bagi Tata Kelola Desa di Kecamatan Tanon

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan ADD perlu terus diarahkan pada ketepatan sasaran dan efektivitas. Pemerintah desa dapat mempertahankan orientasi penggunaan dana pada kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Pengelolaan dana yang efektif perlu didukung perencanaan yang jelas agar alokasi tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Pada aspek akuntabilitas, hasil penelitian mengindikasikan pentingnya menjaga kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Pertanggungjawaban sebaiknya dipahami sebagai proses yang berlangsung sepanjang siklus pengelolaan keuangan, bukan hanya pada saat penyusunan laporan akhir. Pengawasan selama pelaksanaan dapat membantu menjaga kegiatan tetap sesuai rencana.

Aspek yang paling menonjol adalah transparansi. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa informasi pengelolaan keuangan tersedia, mudah diakses, dan disampaikan dengan cara yang dapat dipahami masyarakat. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan publikasi laporan keuangan penting karena masyarakat membutuhkan informasi untuk melakukan pengawasan.

Bagi masyarakat, keterbukaan informasi memberikan kesempatan untuk terlibat lebih aktif dalam pengawasan. Informasi yang tersedia tidak akan optimal apabila tidak digunakan sebagai dasar untuk memahami program dan menilai pelaksanaannya. Tata kelola yang transparan perlu berjalan bersama dengan partisipasi masyarakat agar hubungan *principal-agent* dapat dikendalikan secara lebih efektif.

3.13. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan ketika menafsirkan hasil. Pertama, penelitian menggunakan data primer berbasis kuesioner sehingga hasil sangat bergantung pada persepsi responden. Kedua, objek penelitian dibatasi pada pemerintah desa di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, sehingga generalisasi ke wilayah lain perlu dilakukan secara hati-hati. Ketiga, model hanya memasukkan tiga variabel independen, sementara masih terdapat 24,8% variasi kesejahteraan masyarakat yang belum dijelaskan oleh model.

Keterbatasan tersebut menjadi dasar untuk pengembangan penelitian berikutnya. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah, mempertimbangkan variabel lain yang relevan, atau menggunakan kombinasi sumber data agar gambaran pengelolaan desa lebih komprehensif. Pengujian pada wilayah dengan karakteristik berbeda juga dapat membantu melihat konsistensi hasil penelitian.

3.14. Interpretasi Setiap Koefisien Regresi

Koefisien regresi ADD sebesar 0,158 menunjukkan bahwa perubahan pada kualitas pengelolaan ADD mempunyai arah yang sama dengan perubahan kesejahteraan masyarakat dalam model. Koefisien tersebut merupakan pengaruh parsial setelah variabel akuntabilitas dan transparansi diperhitungkan. Hasil ini memberikan bukti bahwa penggunaan dana desa tetap mempunyai arti penting meskipun pemerintah desa juga harus memperhatikan aspek tata kelola lainnya.

Koefisien akuntabilitas sebesar 0,266 menunjukkan hubungan positif yang lebih besar daripada ADD. Secara empiris, ketika proses pertanggungjawaban semakin baik, kesejahteraan masyarakat cenderung meningkat dalam model. Akuntabilitas dapat menghubungkan proses pengelolaan anggaran dengan hasil program karena setiap tahapan memiliki dasar pertanggungjawaban yang dapat dinilai.

Koefisien transparansi sebesar 0,527 merupakan yang terbesar. Hasil ini menempatkan transparansi sebagai faktor yang paling dominan di antara variabel yang diuji. Dominansi tersebut menunjukkan bahwa, dibandingkan dua prediktor lainnya, variasi transparansi mempunyai hubungan relatif paling kuat dengan variasi kesejahteraan pada data penelitian.

3.15. Hubungan Tata Kelola dan Manfaat Pembangunan

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya merupakan rangkaian proses yang saling berkaitan. Perencanaan menentukan arah penggunaan anggaran, pelaksanaan menerjemahkan rencana menjadi kegiatan, pengawasan memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan, sedangkan pelaporan memberikan informasi mengenai pelaksanaan dan hasilnya. ADD, akuntabilitas, dan transparansi dapat ditempatkan pada rangkaian tersebut sehingga penguatan satu aspek sebaiknya tidak mengabaikan aspek lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel secara parsial berpengaruh positif dan signifikan. Temuan tersebut memberikan gambaran bahwa manfaat pembangunan desa tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dana. Penggunaan dana yang tepat membutuhkan pertanggungjawaban, sementara pertanggungjawaban membutuhkan informasi yang terbuka agar dapat dinilai oleh masyarakat. Keterkaitan ini konsisten dengan kerangka *Agency Theory*.

Dari sisi kesejahteraan, indikator penelitian mencakup pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Artinya, dampak pengelolaan keuangan desa dipahami dalam cakupan yang lebih luas daripada pembangunan fisik. Ketika program desa direncanakan dan dilaksanakan sesuai kebutuhan, masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui pelayanan dan fasilitas yang mendukung kehidupan sehari-hari.

3.16. Kontribusi Penelitian

Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan bukti empiris dari Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen mengenai hubungan ADD, akuntabilitas, dan transparansi dengan kesejahteraan masyarakat. Hasil tersebut melengkapi penelitian sebelumnya yang menghasilkan temuan berbeda antarwilayah. Temuan bahwa transparansi menjadi variabel paling dominan memberikan gambaran bahwa keterbukaan informasi layak memperoleh perhatian dalam evaluasi tata kelola desa di lokasi penelitian.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pemahaman bahwa research gap tidak hanya dapat dilihat dari perbedaan hasil statistik, tetapi juga dari perbedaan konteks. Hasil yang tidak konsisten pada penelitian terdahulu menunjukkan perlunya pengujian ulang pada wilayah dengan karakteristik berbeda. Dengan mengambil 16 desa di Kecamatan Tanon, penelitian ini memperluas konteks empiris pembahasan mengenai tata kelola keuangan desa dan kesejahteraan masyarakat.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Hasil tersebut menunjukkan pentingnya ketepatan penggunaan dana, pemanfaatan untuk pembangunan dan pemberdayaan, serta efektivitas pengelolaan agar ADD memberikan manfaat kepada masyarakat. Akuntabilitas juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertanggungjawaban melalui perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan,

penyusunan laporan, serta keterbukaan pelaporan menjadi bagian penting dalam memastikan sumber daya desa dikelola sesuai amanah. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan menjadi variabel paling dominan dalam model. Temuan ini menunjukkan bahwa ketersediaan informasi, kemudahan akses, keterbukaan keputusan, dan publikasi laporan keuangan memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola desa yang berorientasi pada kesejahteraan. Secara keseluruhan, ketiga variabel menjelaskan 75,2% variasi kesejahteraan masyarakat berdasarkan *Adjusted R Square*. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan sumber daya desa, pertanggungjawaban, dan keterbukaan merupakan komponen yang saling mendukung dalam tata kelola desa.

Reference

1. Damayanti, & Handayani. (2025). Pengaruh Alokasi Dana Desa, akuntabilitas dan transparansi terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(5).
2. Dura, J. (2016). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *JIBEKA*, 10(2). <https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.70>
3. Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
4. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
5. Khasanah, U., & Marisan, I. (2022). Pengaruh penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 32–48. <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.189>
6. Kurniawan, & Efendi. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat.
7. Nasrun, Asdar, & Warda. (2025). Pengelolaan dana desa dan kesejahteraan masyarakat. *AKSIOMA*, 4(1), 26–32. <https://doi.org/10.30822/aksioma.v4i1.4391>
8. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Polii, F. S., Rumokoy, L. J., & Ogi, I. W. J. (2024). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan transparansi terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal EMBA*, 12(3). <https://doi.org/10.35794/emba.v12i03.57995>
10. Rahayu, Widiawati, & Winarko. (2026). Tata kelola dana desa dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 6(2), 510–523. <https://doi.org/10.55587/jla.v6i2.327>
11. Rukmana, Utami, & Darmanto. (2023). Penggunaan dana desa, akuntabilitas dan transparansi terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 2(2), 307–316. <https://doi.org/10.53088/jikab.v2i2.43>
12. Sari, Syafina, & Daulay. (2024). Pengelolaan dana desa dan kesejahteraan masyarakat. *Keberlanjutan*, 9(1), 72–82. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v9i1.y2024.p72-82>
13. Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif. Alfabeta.
14. Udzmah, Amalia, & Wicaksono. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. *JAE*, 9(1), 31–42. <https://doi.org/10.29407/jae.v9i1.21823>
15. Widowati, Utami, & Samanto. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 2(3), 430–442. <https://doi.org/10.53088/jikab.v2i3.69>
16. Widyaningrum, W., & Rusdi, D. (2025). Pengaruh transparansi dalam sistem pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa guna kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 11(2), 446–458. <https://doi.org/10.53494/jira.v11i2.1075>
17. Yonara, Mulyani, & Tigor. (2022). Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, dan transparansi terhadap kesejahteraan masyarakat.